



Sistem Informasi Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Nency Extise Putri ^{✉1}, Elizamiharti², Arman³

Sistem Informasi, STMIK Indonesia Padang, Indonesia^{1,2,3}

email: nencyextiseputri@stmikindonesia.ac.id¹, elizamiharti@stmikindonesia.ac.id²,
arman@stmikindonesia.ac.id³

Received 31 January 2021, Accepted 18 March 2021, Published 31 March 2021

Abstrak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkot yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Sangat banyak data pelanggaran yang ditangani dan masih manualnya pendataan pelanggaran mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan data pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sehingga diperlukan sebuah sistem informasi pendataan pelanggaran perda. Metode pengembangan sistem dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian pustaka, penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan *System Development Life Cycle* (SDLC). Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah PHP dengan database MySQL Server. Hasil penelitian ini adalah sebuah sistem informasi pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP Kota Padang yang mempermudah dan mempercepat pengelolaan data pelanggaran perda, sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Satpol PP, Perda, SDLC, PHP

Abstract

The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Padang City is a supporting element of the Padang City Government's task in securing and implementing City Government policies that are specific in the field of peace and public order. So many data on violations are handled and the manual data collection of violations results in not yet optimal management of data on violations of Regional Regulations (Perda), so we need an information system for collecting data on violations of regulations. The method of development in the preparation of this study in library research, field research, laboratory research and System Development Life Cycle (SDLC). The author's program implementation uses PHP programming language with MySQL Server database. This research result is an information system data collection a breach of regulations on police officers of the city that will simplify and accelerate data management wrongdoing, local regulations so that services on the community is getting better.

Keywords: MySQL Information Systems, Satpol PP, Perda, SDLC, PHP, MySQL

✉ Corresponding author

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah[1]. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai Perda Kota Padang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang[2].

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkot yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi Satpol PP Kota Padang sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Padang adalah seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima (PKL), minuman keras, tindak kejahatan, prostitusi, kenakalan remaja, hotel, cafe, gelandangan pengemis, anak jalanan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), penyakit masyarakat (PEKAT) dan sebagainya.

Pada tahun 2018 tercatat 2491 kasus pelanggaran Peraturan Daerah telah ditangani oleh Satpol PP kota Padang. Sementara itu pencatatan pelanggaran perda yang ditangani satpol PP masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Aplikasi *Ms. Excel*. Begitu banyaknya data pelanggaran yang ditangani dan masih manualnya pendataan pelanggaran mengakibatkan tidak optimalnya pengarsipan. Selain itu, dengan masih manualnya pencatatan data mengakibatkan sulitnya melakukan pencarian berkas arsip pelanggaran Peraturan Daerah yang membutuhkan waktu cukup lama karena berkas arsip pelanggaran Peraturan Daerah yang begitu banyak. Sistem manual juga mengakibatkan sering terjadinya redundansi data terhadap pelanggar yang pernah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Kemudian sistem manual ini juga mengakibatkan sulitnya pimpinan dalam memantau pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang sudah ditindak guna dianalisis sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Adapun studi sebelumnya yang sudah membahas tentang penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian pertama telah dilakukan oleh Rahmi Andini Syamsuddin (2020) dengan judul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Serpong", hasilnya adalah menunjukkan masih ada indikator kinerja yang masih

kurang baik yaitu pada indikator *effectiveness*. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik seperti pada indikator *responsibility*, Unit SatpolPP Kecamatan Serpong telah melakukan sosialisasi kepada PKL di Pasar Serpong. Selanjutnya untuk indikator responsivitas, hasil terhadap kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong sudah baik berdasarkan pengukuran pada keluhan, kritik dan saran yang diterima dengan baik oleh SatpolPP kecamatan Serpong. Indikator terakhir adalah *accountability*, hasilnya adalah sudah baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan Peraturan Daerah, SatpolPP Kecamatan Serpong sudah berjalan dengan mutu yang baik, kisaran waktu yang sesuai serta prosedur yang tidaksulit dipahami oleh masyarakat[3].

Penelitian kedua dilakukan oleh Ardi Cahya Prasetyo, dkk pada tahun (2018) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Kegiatan Operasional Pada Satpol PP Tanjung Jabung Timur Jambi”, hasil penelitiannya adalah dengan adanya sistem informasi maka kegiatan operasional pada Satpol PP Tanjung Jabung Timur sudah lebih terorganisir dan lebih rapi dibandingkan pada saat belum menggunakan sistem informasi dan masyarakat umumpun dapat langsung melaporkan pelanggaran yang terjadi langsung melalui sistem informasi ini, tanpa perlu datang ke kantor Satpol PP Tanjung Jabung Timur[4].

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Taher Jufri dan Ratzwell Bonay (2017) dengan judul “Sistem Informasi Kepegawaian Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua”, hasil penelitiannya adalah dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian pada kantor satuan polisi pamong praja provinsi papua ini maka dapat mempermudah petugas khususnya pada bidang kepegawaian untuk mengolah data pegawai dan data surat ijin belajar, surat keterangan, dan surat cuti pegawai secara cepat[5].

Beberapa penelitian terdahulu belum pernah membahas tentang pendataan pelanggaran peraturan daerah pada Satpol PP dan berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pendataan pelanggaran peraturan daerah di atas maka penulis berinisiatif membuat sebuah sistem yang terkomputerisasi untuk pencatatan dan monitoring data pelanggaran peraturan sehingga memudahkan petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi[6]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku[7].

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, data pelanggaran akan tersimpan dengan aman dalam sebuah *database* sehingga mempermudah petugas Satpol PP dalam pencarian arsip data yang telah lama. Selain itu, juga mempermudah pimpinan untuk mengakses data pelanggaran Peraturan Daerah melalui internet *browser* dengan menggunakan opera, google chrome dan lain-lain.

METODOLOGI

Metodologi penelitian merupakan mekanisme penyelesaian masalah penelitian dan menjelaskan mengenai metode yang digunakan selama penelitian ini [8]. Metode yang akan dipakai dalam penelitian sangat menentukan kualitas hasil penelitian tersebut, dalam penulisan ini metode yang penulis gunakan adalah :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis banyak memperoleh referensi dari buku-buku, internet, dan literatur yang berhubungan dengan pemecahan masalah dalam pendataan pelanggaran Perda pada Satpol PP kota Padang.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini dilakukan peninjauan langsung ke lapangan yaitu mendatangi kantor Satpol PP kota Padang, dalam pengumpulan datanya adalah dengan teknik wawancara dan pemberian daftar pertanyaan (*Quisioner*) kepada bagian-bagian yang terkait dengan penulisan ini.

3. Penelitian Laboratorium (*Laboratory Research*)

Penelitian Laboratorium merupakan penelitian yang dilakukan di laboratorium komputer dan berguna untuk mengolah data serta informasi yang telah didapat dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari rancangan dan desain yang diterapkan.

4. *Systems Development Life Cycle (SDLC)*

Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Metode siklus hidup pengembangan sistem atau *system development life cycle (SDLC)* mempunyai beberapa tahapan, dari suatu tahapan awal ke tahapan akhir, lalu kembali lagi ke tahapan awal membentuk suatu siklus atau daur hidup [9].

SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan. SDLC ini juga merupakan siklus pengembangan sistem yang meliputi sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang ada pada sistem sedang berjalan, diantaranya adalah belum tersedianya sistem informasi yang dapat digunakan secara online dan pembuatan laporan yang lengkap sebagai acuan atasan dalam hal pembinaan dan pengembangan karir pegawai.

- b. Analisis Sistem (*System Analysis*)

Tujuan dari analisis sistem adalah untuk menentukan masalah yang dihadapi dalam pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP kota Padang, supaya mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan, sehingga diharapkan masalah yang ada dapat diatasi.

c. Rancangan Sistem (*System Design*)

Pada sistem *design*, yaitu melakukan perancangan konsep berupa pembuatan *Context Diagram*, DFD, dan ERD sistem informasi pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP kota Padang. Disamping ini juga melakukan perancangan fisik yang meliputi:

- (1) Perancangan input, perancangan ini menentukan masukan atau entrian data yang digunakan pada kegiatan input data, misalnya seperti entrian data pelanggar.
- (2) Perancangan *database*, perancangan ini menentukan format database yang digunakan untuk menghasilkan suatu sistem informasi pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP kota Padang yang lebih aman dan akurat.
- (3) Perancangan output, perancangan ini menentukan format dan isi dari laporan yang di inginkan untuk sistem informasi manajemen pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP kota Padang guna tindak lanjut pengambilan keputusan oleh atasan.

d. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari perancangan design yang telah dilakukan, sehingga pada tahap ini menghasilkan suatu perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan oleh Satpol PP kota Padang dalam hal meningkatkan kinerja Satpol PP kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan ini akan dibahas tentang hasil analisis, perancangan sistem dan pembahasan hasil penelitian.

1) Hasil Analisis

Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi dalam menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya.[10] Analisis sistem didefinisikan bagaimana memahami dan mengekspresikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem.[11]

Berdasarkan pengamatan di lapangan, diperoleh gambaran secara singkat tentang keadaan sistem yang berjalan pada Satpol PP Kota Padang, kendalanya yaitu Satpol PP mengalami kesulitan dalam mengelola data pelanggaran peraturan daerah yang belum terorganisir secara baik sehingga hal tersebut mengurangi kinerja Satpol PP.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan kendala yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan saat ini, maka diusulkan suatu aplikasi yang dapat membantu dan memberikan kemudahan baik dalam melakukan proses pencatatan data pelanggaran yang saat ini sering terjadi kesalahan dan memakan waktu yang lama. Selain itu, dengan adanya pembuatan aplikasi pendataan pelanggaran peraturan yang diusulkan dapat membantu pihak Satpol PP dalam

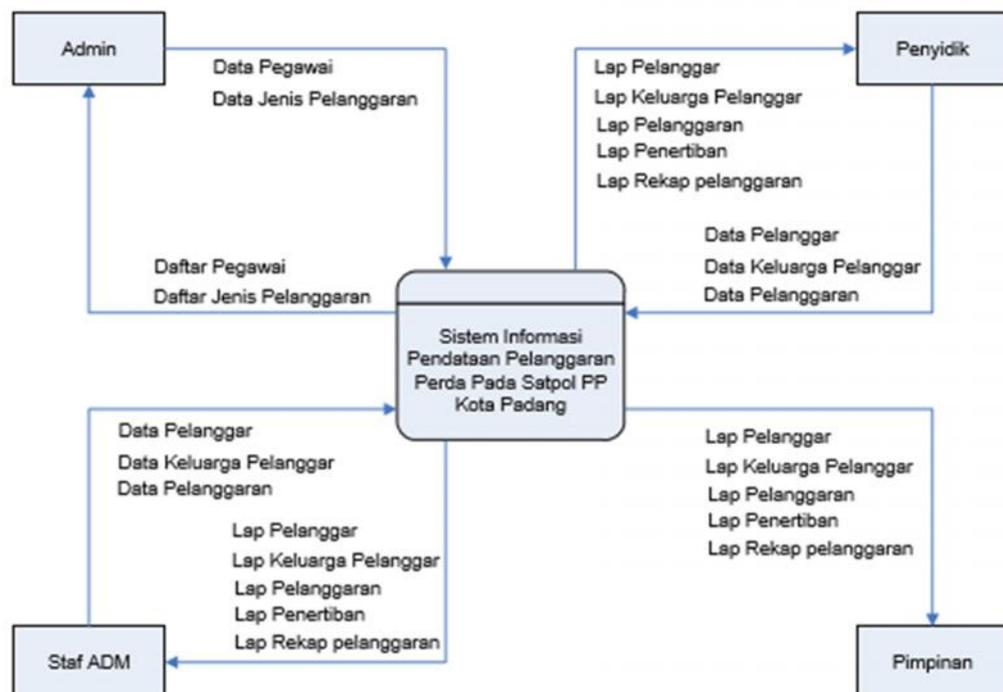
proses kegiatan pengolahan data pelanggaran peraturan yang belum sepenuhnya dapat terselesaikan dengan baik. Serta dapat membantu meningkatkan kualitas dan kinerja Satpol PP serta pimpinan lebih mudah memonitoring data pelanggaran secara langsung dan secara cepat bisa memperoleh laporan data pelanggaran tanpa harus menunggu rekapan dari operator staf P3D.

2) Perancangan Sistem

Desain diperlukan dengan tujuan bagaimana sistem akan memenuhi tujuannya dibuat atau diciptakan. Desain sistem terdiri dari kegiatan dalam mendesain yang hasilnya sebuah spesifikasi dari sistem[12]. Adapun Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan alat bantu perancangan terstruktur yaitu *Context diagram* dan Entity Relationship Diagram (ERD).

a) Context Diagram

Context Diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat didalam suatu organisasi yang memperhatikan batasan (*boundary*) sistem, adanya interaksi antara eksternal entiti dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir diantara entiti dan sistem[13]. *Context diagram* untuk Sistem Informasi Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah (SIMGARDA) dapat dilihat pada Gambar 1.



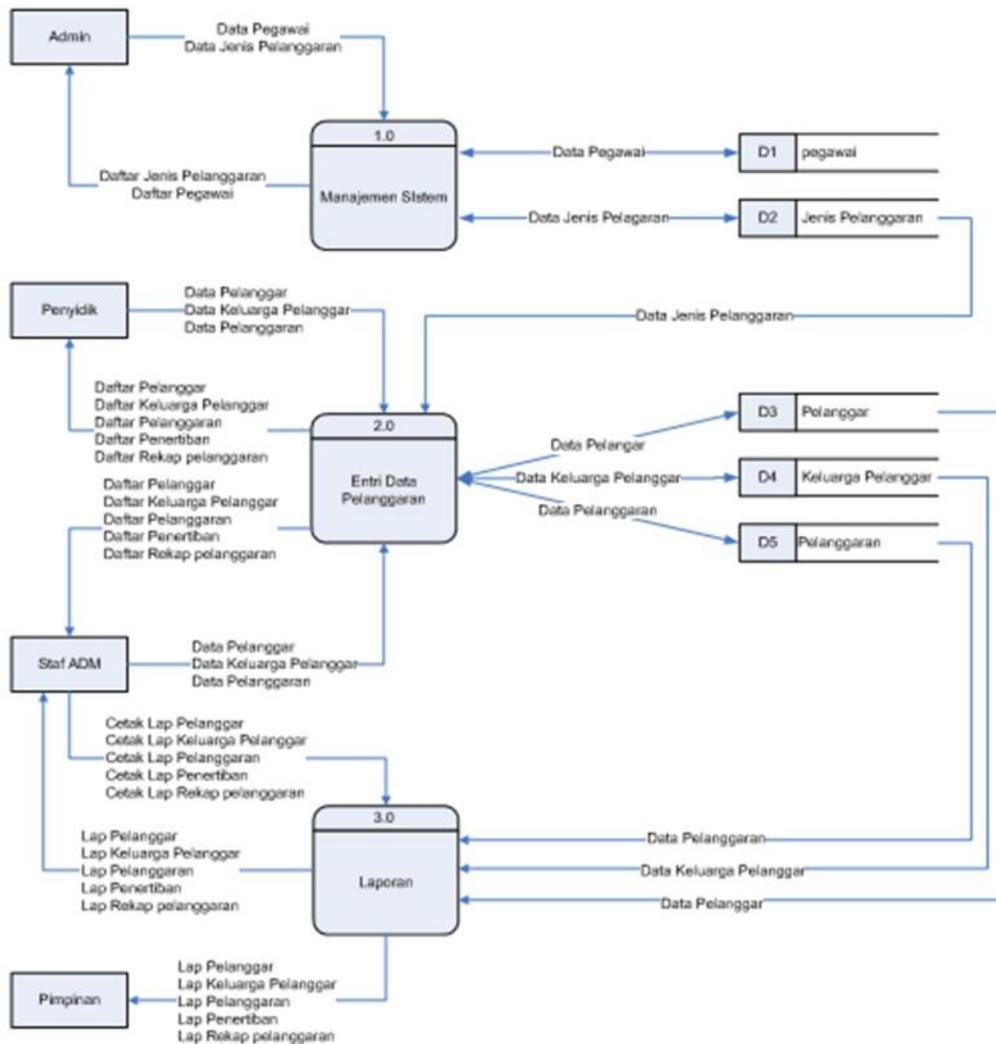
Gambar 1. Context Diagram SIMGARDA

Pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa sistem informasi yang diusulkan memiliki 4 (empat) terminator atau entitas, yaitu admin, penyidik, staf administrasi dan pimpinan. Pada gambar tersebut juga menjelaskan secara

umum aktifitas apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing entitas atau terminator dan apa saja respon yang diberikan sistem atas aksi yang dilakukan oleh entitas.

2. Data Flow Diagram (DFD)

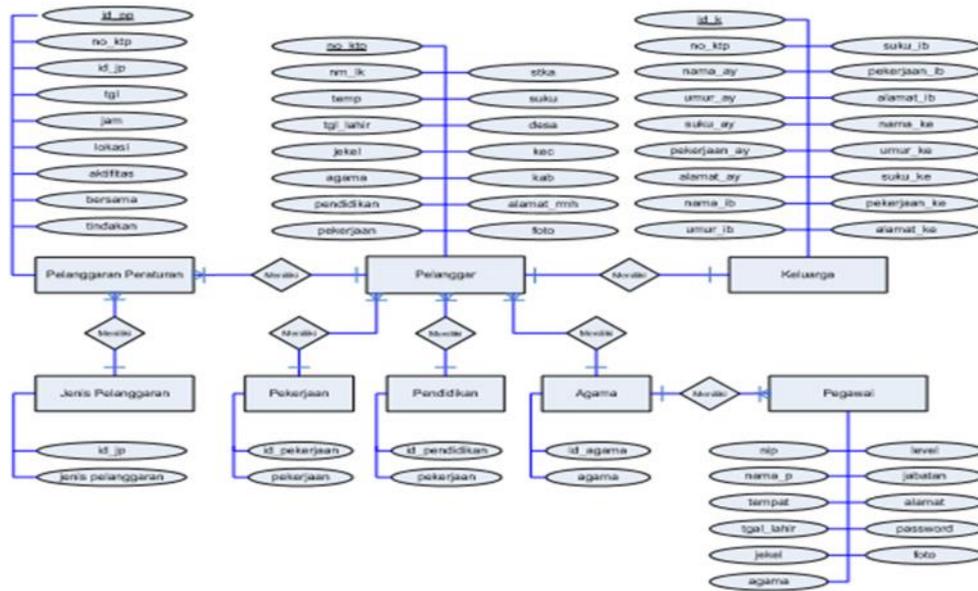
Data flow diagram berfungsi untuk menggambarkan arus data dalam sistem dengan terstruktur dan jelas[14]. Adapun DFD dari SIMGARDA dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. DFD SIMGARDA

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD (*Entity Relationship Diagram*) ERD merupakan hubungan antara *entity-entity* yang terdapat dalam suatu database [15]. Adapun ERD dari SIMGARDA ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. ERD SIMGARDA

Pada Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa :

- Entitas jenis pelanggaran dengan entitas pelanggaran peraturan memiliki derajat kardinalitas *one-to-many*. Yang mana satu jenis pelanggaran bisa memiliki satu atau lebih pelanggaran peraturan dan satu pelanggaran peraturan memiliki satu jenis pelanggaran.
- Entitas pelanggar dengan entitas pelanggaran peraturan memiliki derajat kardinalitas *one-to-many*. Yang mana satu pelanggar bisa memiliki satu atau lebih pelanggaran peraturan dan satu pelanggaran peraturan memiliki satu pelanggar.
- Entitas pelanggar dengan entitas keluarga memiliki derajat kardinalitas *one-to-one*. Yang mana satu pelanggar memiliki satu keluarga dan satu keluarga memiliki satu pelanggar.
- Entitas pekerjaan dengan entitas pelanggar memiliki derajat kardinalitas *one-to-many*. Yang mana satu pekerjaan bisa memiliki satu atau lebih pelanggar dan satu pelanggar memiliki satu pekerjaan.
- Entitas pendidikan dengan entitas pelanggar memiliki derajat kardinalitas *one-to-many*. Yang mana satu pendidikan bisa memiliki satu atau lebih pelanggar dan satu pelanggar memiliki satu pendidikan.
- Entitas agama dengan entitas pelanggar memiliki derajat kardinalitas *one-to-many*. Yang mana satu agama bisa memiliki satu atau lebih pelanggar dan satu pelanggar memiliki satu agama.

g. Entitas agama dengan entitas pegawai memiliki derajat kardinalitas *one-to-many*. Yang mana satu agama bisa memiliki satu atau lebih pegawai dan satu pegawai memiliki satu agama.

3) Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dan perancangan sistem maka dapat dibuat SIMGARDA ini. Berikut ini hasil dari implementasi sistem yang telah dirancang oleh penulis sebagai berikut.

a) Halaman Login

Sistem ini berbasis *web* namun dijalankan secara *local* di *server* terpusat, maka halaman pertama kali muncul adalah halaman *login* sebagai sistem keamanan sehingga tidak sembarangan user dapat mengakses sistem ini. Adapun halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Login SIMGARDA

b) Menu Admin

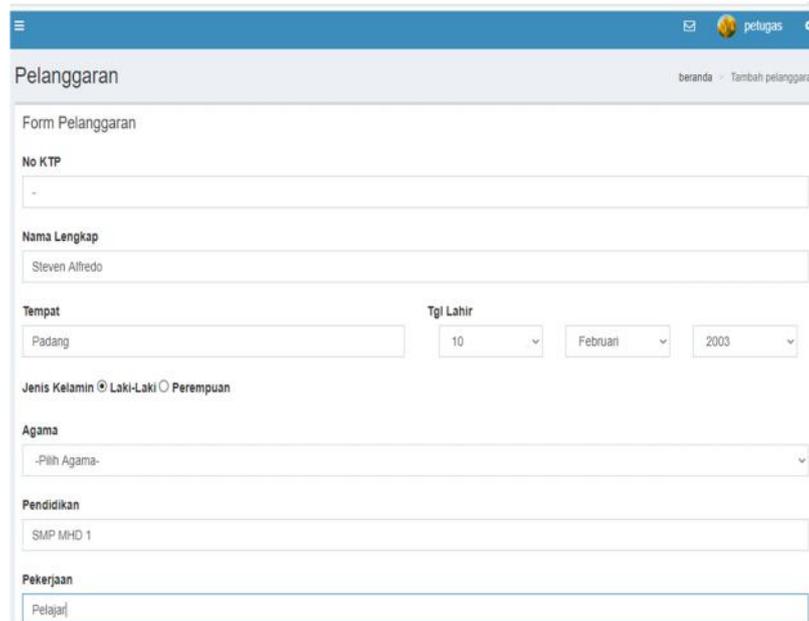
Menu admin berfungsi untuk pengelola dari seluruh sub-sub dalam menu tersebut. Keseluruhan sub-sub menu tersebut dieksekusi dalam menu Admin. Adapun menu admin dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Manu Admin SIMGARDA

c) **Form Pelanggaran**

Form pelanggaran berisi tentang identitas si pelanggar form ini hanya bisa diakses oleh petugas. Adapun halaman login dapat dilihat pada Gambar 6.



Agama
Islam

Pendidikan
Sma

Pekerjaan
-

Status Perkawinan Kawin Belum Kawin

Suku
Chaniago

Desa
Tanjung Bonai Aur

Kecamatan
Sumpur Kudus

Kabupaten
Sijunjung

Alamat Rumah
Jln. perjuangan No 1 Sijunjung

Foto
Pilih File Hydrangeas.jpg

Simpan Bersihkan

Imrah Sari © 2018

Gambar 6. Form Pelanggaran SIMGARDA

d) **Form Keluarga**

Form keluarga berisi identitas keluarga si pelanggar seperti data ayah, data ibu dan kerabat. Adapun form data pelanggar dapat dilihat pada Gambar 7.

Keluarga beranda > Tambah Keluarga

Form Keluarga

No KTP
131100765432123456

Nama Ayah
Nazarudin

Umur Ayah
45

Suku Ayah
Koto

Pekerjaan Ayah
Pedagang

The image shows a web form titled "Form Keluarga" (Family Form). It is divided into two main sections: "Ibu" (Mother) and "Kerabat" (Relative).
The "Ibu" section includes fields for:
- **Alamat Ayah**: Sijunjung
- **Nama Ibu**: Aini Sarmis
- **Umur Ibu**: 40
- **Suku Ibu**: Chaniago
- **Pekerjaan Ibu**: RT (highlighted in yellow)
- **Alamat Ibu**: Sijunjung
The "Kerabat" section includes fields for:
- **Nama Kerabat**: Toni
- **Umur Kerabat**: 30
- **Suku Kerabat**: Caniago
- **Pekerjaan Kerabat**: Pedgang (highlighted in yellow)
- **Alamat Kerabat**: Padang
At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" (Save) and "Bersihkan" (Clear).

Gambar 7. Form Keluarga

e) **Form Pelanggaran Peraturan**

Form ini berisi tentang jenis pelanggaran yang dilanggar, waktu, tempat, bersama, serta tindakan. Adapun halaman dapat dilihat pada Gambar 8.

The image shows a web form titled "Form Pelanggaran Peraturan" (Violation Registration Form). It contains the following fields:
- **No Ktp**: 13110076543212123456
- **Jenis Pelanggaran**: Kenakalan Remaja (dropdown menu)
- **Tanggal**: 03-01-2018
- **Jam**: 120000
- **Lokasi**: Padang

Gambar 8. Form Pelanggaran Peraturan

f) Laporan Data Penertiban Pelanggaran

Menu ini akan menampilkan data dari Pelanggar, nama ayah, nama ibu, jenis pelanggaran, dan petugas juga bisa melakukan Edit dan Hapus pada menu ini. Adapun laporan penertiban dapat dilihat pada Gambar 9.

LAPORAN DATA PELANGGAR PERATURAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

No	no_sfp	Nama Lengkap	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Status Perkawinan	Suku	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Alamat Rumah	Foto
1	973889802878394	Ade Hujardi	Padang/2000-05-07	Laki-Laki	Islam	Tamat SMA	Pelajar	Belum Kawin	Malayu	Andaluh Timur	Padang	Padang	Andaluh Padang	
2	120944783030494	Ahmad Amrullah	Padang/1999-04-01	Laki-Laki	Islam	Tamat SMA	Pelajar	Belum Kawin	Malayu	Gaduk	Lubuk Kilangan	Padang	Perumahan Unand Gaduk Blok B no 32	
3	13171819201018172839	Dilly Harjanto	Solo/1284-02-11	Laki-Laki	Islam	Tamat SMA	Pelajar	Belum Kawin	Tanjung	Alahan panjang	Danu Sembur	Solo	Lepai Padang	
4	108791894093834	Giang Ramadhan	Padang/2001-02-03	Laki-Laki	Islam	Tamat SMA	Pelajar	Belum Kawin	Chaniago	Aia Pacah	Koto Tengah	Padang	By Pass Kilometer 21	
5	13454272423910001483	Insjad	Padang/2002-02-11	Laki-Laki	Islam	Tamat SMA	Pelajar	Belum Kawin	Chaniago	Aia Pacah	Koto Tengah	Padang	Aia pacah	
9	123889323180478	Rahlan Harali Fatin	Padang/2000-05-12		Islam	Tamat SMA	Pelajar	Belum Kawin	Pilang	Lubuk Buaya	Koto Tengah	Padang	Taman Sakinah Blok D 16	
10	1381820098785283	Devan Alfredo	Padang/2001-05-03		Islam	Tamat SMA	Pelajar	Belum Kawin	Koto	Aia Pacah	Koto Tengah	Padang	Aia Pacah Padang	

KORPRI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANG

Kabid PSD

Padang 30 Desember 2019
Kasi Penyidik

H. AL AMIN, S.Sos, M.H
NIP. 19690291897031004

DIA PUTRA B.S, STP, MBA
NIP. 196104171896121001

DONI HERDANUS
NIP. 196909151986111001

Gambar 9. Laporan Penertiban

g) Rekapitulasi Penertiban

Pada menu ini petugas dan pimpinan dapat melihat jumlah data pelanggaran peraturan berdasarkan jenis dan bulan. Adapun rekapitulasi penertiban dapat dilihat pada Gambar 10.

REKAPITULASI KEGIATAN PENERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
PADA BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2018

No	Kota	Jenis Kegiatan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jml Kasus	Tindakan/Proses			
																Pembinaan	Tripping	PSKW AD	DKSOS
1	P	Peklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	PSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	Kenakalan Remaja	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	A	Salon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	MB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G	Kafe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PKL/BANGLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Judi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Galian C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ltn Gangguan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pedagang Asongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JML	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			1	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	10	10	0	0	0

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANG

YODRIZON,SH.,M.Si
NIP:196208031987031008

Kabid PSD

EKA PUTRA B.S.STP.MBA
NIP:198104171999121001

Padang 30 desember 2018
Kasi Penyidik

DONI HERDANUS
196609151986111001

Gambar 10. Rekapitulasi Penertiban

h) Grafik penertiban per Jenis Pelanggaran per Bulan
 Pada menu ini petugas dan pimpinan dapat melihat Grafik Penertiban Per Jenis Pelanggaran Per Bulan. Adapun grafik penerbitan dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Grafik Penertiban

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu membuat sistem informasi pendataan pelanggaran Perda pada Satpol PP Kota Padang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini dapat mempermudah Satpol PP dalam melakukan pendataan dan pencarian data pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Aplikasi ini dapat lebih mengoptimalkan pengarsipan data dan bisa mencegah terjadinya redudansi data pelanggaran Peraturan Daerah.

3. Aplikasi ini dapat mempermudah pimpinan Satpol PP Kota Padang dalam memantau pelanggaran Peraturan Daerah yang sudah ditindak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada yayasan Albani Mukmin Padang dan STMIK Indonesia Padang atas masukan dan saran penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada SatPol PP kota Padang yang telah mengizinkan meneliti di kantor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Indonesia, "Presiden republik indonesia," 2004.
- [2] "71_tahun_2016_edit.pdf." .
- [3] P. Manajemen, F. Ekonomi, and U. Pamulang, "effectiveness , responsiveness , responsibility , accountability," vol. 3, no. 1, pp. 1-20, 2020.
- [4] A. Cahya Prasetyo *et al.*, "Implementasi Sistem Informasi Kegiatan Operasional Pada Satpol PP Tanjung Jabung Timur Jambi," *Julyxxxx*, vol. x, No.x, pp. 1-5.
- [5] M. T. Jufri and R. Bonay, "SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA," 2017.
- [6] H. T. SIHOTANG, "Sistem Informasi Pengagendaan Surat Berbasis Web Pada Pengadilan Tinggi Medan," vol. 3, no. 1, pp. 6-9, 2019, doi: 10.31227/osf.io/bhj5q.
- [7] B. A. B. Ii, "R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum , cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40. ibid , h. 41."
- [8] A. R. Adiguna, M. Chandra Saputra, and F. Pradana, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Gudang pada PT Mitra Pinasthika Mulia Surabaya," 2018. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>.
- [9] R. Turaina, E. Elizamiharti, and H. E. Rahma, "Sistem Informasi Pengarsipan Berkas Perkara Pidana dan Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang," *Indones. J. Comput. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 12-30, 2018, doi: 10.33022/ijcs.v6i1.11.
- [10] Muhammad Muslihudin dan Oktafianto, "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML - Muhamad Muslihudin, Oktafianto - Google Buku." p. 118, 2016.
- [11] N. E. Putri and S. Azpar, "Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika V2.i2(203-212) 203 Diterbitkan Oleh Program Studi Pendidikan Informatika STKIP PGRI Sumbar Sistem Informasi Pengolahan Data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Amalia Syukra Padang."
- [12] D. Purnomo, "Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi," *J I M P - J. Inform. Merdeka Pasuruan*, vol. 2, no. 2, pp. 54-61, 2017, doi: 10.37438/jimp.v2i2.67.
- [13] N. D. A. N. Mysql, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA ALINIA MART BERBASIS MULTI USER DENGAN JAVA," vol. 24, no. 2, pp. 221-230, 2017.
- [14] S. Kasus, D. I. Pt, P. Nusantara, and V. Tambaksari, "*1 , #2," pp. 1-15, 2017.
- [15] R. Saputra, "VOL . 9 NO . 1 April 2016," vol. 9, no. 1, pp. 56-66, 2016.